

Trans-Sumatera 2025

Rancangan Peraturan Presiden Diteken Pekan Depan

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah berkomitmen menyertakan modal negara ke PT Hutama Karya selaku pihak yang ditunjuk membangun konstruksi dan mengelola operasional Tol Trans-Sumatera.

Langkah ini merupakan bentuk jaminan pemerintah guna mempercepat pembangunan proyek itu.

Jalan tol sepanjang 2.700 kilometer tersebut ditargetkan tuntas tahun 2025.

Demikian antara lain hal penting dari Rancangan Peraturan Presiden tentang Penugasan Pembangunan Tol Trans-Sumatera yang tahap pembahasan akhirnya digelar di Jakarta, Rabu (6/3). Pembahasan dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Hadir, antara lain, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, dan Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar.

Rancangan peraturan presiden tersebut, menurut Hatta, sudah final. Setelah dirapikan, secara

administrasi tinggal dikirimkan ke Presiden untuk ditandatangani. Menurut rencana, penandatanganan dilakukan pekan depan.

Pemerintah, melalui peraturan presiden tersebut, menugaskan PT Hutama Karya membangun konstruksi dan mengelola operasional Tol Trans-Sumatera. PT Hutama Karya adalah BUMN yang 100 persen sahamnya milik pemerintah.

Sebagai bentuk jaminan dan dukungan konkret, kata Hatta, pemerintah berkomitmen menyertakan modal negara ke PT Hutama Karya. Total kebutuhan penyertaan modal negara belum ditetapkan, tetapi besarnya Rp

2 triliun sampai Rp 5 triliun. Nilai tersebut akan dibagi sesuai kebutuhan proyek setiap tahunnya.

"Kita berharap dengan perpres tersebut pembangunan jalan yang selama ini lambat sekali bisa cepat," kata Hatta.

Di samping penyertaan modal negara, Hatta menambahkan, PT Hutama Karya juga diberi ruang untuk menarik dana dari aksi korporasi, seperti utang dan menerbitkan obligasi.

PT Hutama Karya juga diberi keleluasaan untuk bekerja sama dengan badan usaha, baik swasta maupun BUMN. Namun, prinsipnya, hak pengelolaan atas proyek tetap di tangan PT Hutama Karya.

Ditanya soal pengadaan lahan, Hatta mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum telah mengidentifikasi. Diakui, masih ada sejumlah kendala di lapangan.

"Di republik ini, pembebasan tentu saja ada masalah. Biasa, enggak ada yang lancar, tetapi relatif jauh lebih gampang dari-

pada di Jawa," kata Hatta.

Tol Trans-Sumatera sepanjang 2.700 km terbentang dari Lampung sampai Aceh. Proyek itu terbagi dalam 22 ruas. Hatta mengharapkan proyek sudah bisa mulai tahun ini di ruas-ruas yang dirasakan padat, seperti Indralaya-Palembang, Pekanbaru-Padang, dan Pekanbaru-Binjai.

Pembiayaan

Mahendra Siregar menambahkan, pembiayaan tol akan diusahakan dari penyertaan modal negara, pinjaman, dan obligasi. Nilai proyek belum dibahas terlalu detail. Namun, yang pasti, nilai total proyek akan dijabarkan per tahun agar tampak kebutuhan pembiayaan per tahun.

Utang ataupun obligasi, kata Mahendra, akan dijamin pemerintah. "Karena ini *multiyears*, selama itu dibutuhkan, maka akan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan bentuk kepastian dari pelaksanaan proyek itu," kata Mahendra. (LAS)